

DIGITALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BINA BARU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Muhammad Rais Rahmat Razak^{1*}, Nurjannah Nonci², Sandi Lubis³, Dayadi⁴, Mutiah Khaerunnisa⁵
^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
Indonesia

*Korespondensi: mraisrahmat@gmail.com

Citation (APA):

Razak, M. R. R., Nonci, N., Lubis, S., Dayadi, & Khaerunnisa, M. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bina Baru Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 411–422. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4947>

Email Autors:

mraisrahmat@gmail.com
nurjannahnonci62@gmail.com
sandi.lubis7@gmail.com
dayadiemanrosi@gmail.com
mthkhaerunnisa@gmail.com

Submitted: 24 September, 2025

Accepted: 15 Oktober, 2025

Published: 16 November, 2025

Copyright © 2025 Muhammad Rais Rahmat Razak, Nurjannah Nonci, Sandi Lubis, Dayadi, Mutiah Khaerunnisa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis digitalisasi pengelolaan dana desa di Desa Bina Baru dengan fokus pada kondisi implementasi, peran stakeholder, dan strategi peningkatan efektivitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data NVivo 12 Plus melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Operator Desa, Sekretaris Desa, dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan dana desa mengalami kondisi paradoks dengan pencapaian parsial di berbagai aspek. Sistem digital telah berhasil diimplementasikan secara operasional internal dan memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam fungsi administratif dan manajerial. Namun, digitalisasi menghadapi tantangan signifikan dalam aspek aksesibilitas publik dimana masyarakat tidak dapat mengakses sistem digital, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas belum tercapai optimal. Transformasi digital melibatkan peran kolaboratif dari berbagai stakeholder dengan diferensiasi yang jelas. Strategi peningkatan efektivitas digitalisasi memerlukan pendekatan komprehensif meliputi peningkatan aksesibilitas melalui portal digital publik, stabilisasi infrastruktur teknis, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan partisipasi masyarakat dengan mekanisme konsultasi digital, dan kolaborasi multi-stakeholder.

Kata kunci: Digitalisasi; Dana Desa; Transparansi; Akuntabilitas; Transformasi Digital

ABSTRACT

This study analyzes the digitization of village fund management in Bina Baru Village, focusing on implementation conditions, stakeholder roles, and strategies for improving effectiveness. Using a qualitative approach with NVivo 12 Plus data analysis through in-depth interviews with Village Head, Finance Head, Village Operator, Village Secretary, and Community Leaders. The research results show that digitization of village fund management experiences paradoxical conditions with partial achievements in various aspects. Digital systems have been successfully implemented operationally internally and provide convenience for village officials in administrative and managerial functions. However, digitization faces significant challenges in public accessibility aspects where the community cannot access digital systems, so the principles of transparency and public accountability have not been optimally achieved. Digital transformation involves collaborative roles from various stakeholders with clear differentiation. Strategies to improve digitization effectiveness require a comprehensive approach including increasing accessibility through public digital portals, stabilizing technical infrastructure, developing human resource capacity, increasing community participation with digital consultation mechanisms, and multi-stakeholder collaboration.

Keywords: Digitization; Village Funds; Transparency; Accountability; Digital Transformation

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia (Prabowo et al., 2021) Sejak diterapkannya kebijakan dana desa pada tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp400 triliun untuk mendukung pembangunan desa hingga tahun 2023. Namun, pengelolaan dana desa masih menghadapi sejumlah

tantangan signifikan yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi permasalahan mendasar yang saling terkait dan mempengaruhi efektivitas implementasi program pembangunan desa (Afifah 2019).

Dimensi pertama adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2022, sebanyak 1.250 desa di Indonesia mengalami permasalahan dalam pelaporan keuangan. Ketidaktransparan ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, minimnya mekanisme publikasi penggunaan anggaran, lemahnya sistem pelaporan yang dapat diakses publik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Permasalahan akuntabilitas tampak lebih serius dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat 115 kasus penyalahgunaan dana desa sejak tahun 2016 hingga 2023 dengan kerugian negara mencapai Rp120 miliar, mengindikasikan lemahnya sistem pertanggungjawaban, minimnya mekanisme audit internal, dan rendahnya kesadaran aparatur desa tentang prinsip akuntabilitas publik (Mada et al., 2017).

Dimensi kedua adalah kelemahan sistem pengelolaan yang masih konvensional. Sistem pencatatan manual memiliki kerentanan tinggi terhadap kesalahan administratif, risiko kehilangan dokumen, kesulitan pelacakan penggunaan anggaran secara *real-time*, serta lambatnya proses pelaporan. Kondisi ini diperparah dengan kapasitas SDM aparatur desa yang terbatas dalam pengelolaan keuangan modern, kurangnya pelatihan berkelanjutan, tingginya *turnover* operator desa, serta minimnya insentif untuk peningkatan kapasitas (Nahruddin, 2014). Dimensi ketiga adalah lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal, dimana pengawasan internal oleh BPD tidak optimal karena keterbatasan pemahaman teknis keuangan, ketiadaan sistem monitoring terstruktur, minimnya akses data keuangan *real-time*, serta lemahnya independensi, sementara pengawasan eksternal oleh masyarakat terhambat oleh keterbatasan informasi, tidak adanya platform pengawasan partisipatif, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta lemahnya budaya partisipasi. Dimensi keempat adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital yang menjadi hambatan fundamental dalam modernisasi pengelolaan dana desa, meliputi keterbatasan akses internet yang stabil, minimnya perangkat teknologi memadai, rendahnya literasi digital aparatur desa, ketiadaan sistem informasi terintegrasi, serta tingginya biaya investasi teknologi.

Digitalisasi menjadi solusi potensial untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi melalui otomasi proses administratif, transparansi melalui keterbukaan akses informasi, dan akuntabilitas melalui sistem pelacakan terstruktur (Handayani et al., 2023). Implementasi sistem digital diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan melalui sistem kontrol otomatis dan *audit trail* digital, meningkatkan kualitas pelaporan dengan standardisasi format dan validasi data otomatis, memudahkan proses pengawasan melalui platform transparansi digital, serta mempercepat pengambilan keputusan dengan ketersediaan data *real-time* yang akurat.

Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan dana desa. Dengan alokasi dana desa tahun 2023 mencapai Rp1,2 miliar, desa ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran tersebut secara optimal. Namun, sistem pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara

manual, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Hasil audit lokal pada tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran sebesar Rp50 juta di Desa Bina Baru, yang disebabkan oleh kelemahan dalam proses pengawasan dan pencatatan yang masih manual. Kondisi ini mengindikasikan perlunya transformasi dalam sistem pengelolaan dana desa yang lebih moderen dan dapat diandalkan (Anggraini, 2020). Meskipun Desa Bina Baru telah menerapkan sistem digital, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses masyarakat terhadap sistem digital sehingga transparansi belum optimal, masalah teknis berupa aplikasi yang sering *error* dan ketidakstabilan server, kapasitas SDM yang masih terbatas dalam mengoperasikan sistem secara optimal, serta infrastruktur pendukung yang belum memadai.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap sistem pengelolaan dana desa (Lukiastuti et al., 2022), mengenai media sistem pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa keunggulan SDM tidak berpengaruh positif terhadap sistem pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan. Penelitian serupa oleh (Jumaiyah et al., 2025) dalam analisis bibliometrik mengidentifikasi evolusi dan perkembangan penelitian transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa dari 2015-2024.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Razak et al., 2024) dengan judul "*Development of integrated village fund governance model with siberas public service application*" menemukan bahwa integrasi model dengan aplikasi SIBERAS secara substansial meningkatkan proses administratif, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, penelitian (Nasution & Budianto, 2025) menunjukkan bahwa sistem informasi dana desa di Desa Tanjung Hataran meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, meski masih terkendala infrastruktur, literasi digital rendah, dan kurangnya sosialisasi.

Studi terkait digitalisasi desa menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat (Onitsuka et al., 2018). Selain itu, penelitian pentingnya *embedding* teknologi digital dalam proses audit dan pengawasan keuangan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana publik (Werner et al., 2021)

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Bina Baru, implementasi digitalisasi pengelolaan dana desa menghadapi beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan akses masyarakat terhadap sistem digital yang menyebabkan prinsip transparansi belum tercapai optimal. Kedua, masalah teknis berupa sistem yang sering mengalami *error* dan ketidakstabilan server. Ketiga, kapasitas SDM yang masih terbatas dalam mengoperasikan sistem digital secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual (Creswell, 2014). Lokasi penelitian dipilih karena desa ini telah menerapkan sistem digital dalam pengelolaan dana desa namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposif. Teknik *purposive sampling* digunakan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2015). Informan dalam penelitian ini meliputi: (a) Kepala Desa sebagai pimpinan dan penanggung jawab kebijakan; (b) Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana teknis keuangan; (c) Operator Desa sebagai pengelola sistem digital; (d) Sekretaris Desa sebagai koordinator administrasi; dan (e) Tokoh Masyarakat sebagai representasi masyarakat.

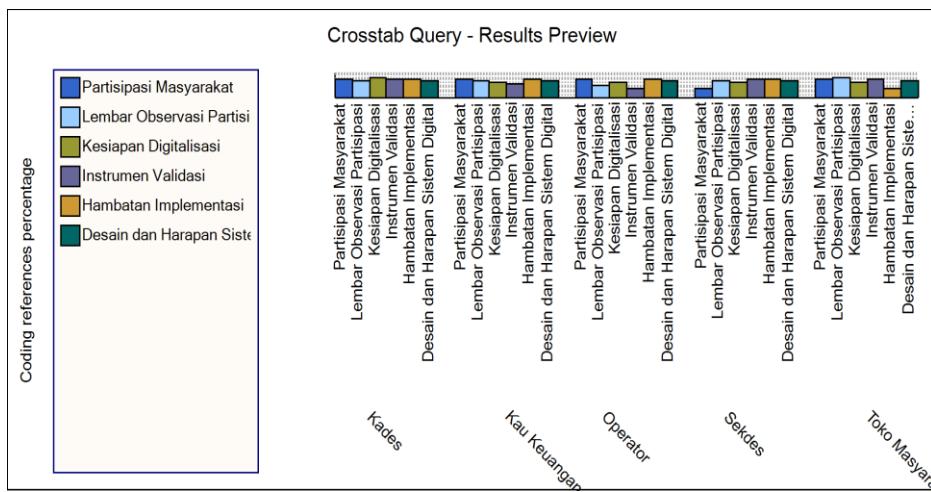
Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang mengacu pada konsep triangulasi metode untuk meningkatkan validitas data. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi langsung untuk mengamati proses implementasi sistem digital, wawancara mendalam untuk menggali informasi dari informan kunci, dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen resmi dan catatan terkait, serta *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan perspektif komprehensif dari berbagai stakeholder (Daruhadi & Sopiati, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software NVivo 12 Plus* melalui lima tahap sistematis. Pertama, tahap persiapan data dimulai dengan mengimpor transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen dalam format *Word* dan *PDF*, kemudian mengklasifikasikan sumber data berdasarkan jenis informan (Kepala Desa, Kaur Keuangan, Operator Desa, Sekretaris Desa, dan Tokoh Masyarakat) serta membuat atribut untuk setiap sumber data. Kedua, tahap coding dan kategorisasi dilakukan melalui initial coding untuk mengidentifikasi tema awal secara induktif, *axial coding* untuk mengelompokkan kode-kode awal ke dalam kategori yang lebih luas, dan *selective coding* untuk menyempurnakan kategori serta mengidentifikasi hubungan antar tema melalui pembuatan nodes hierarkis. Ketiga, tahap analisis relasional menggunakan *matrix coding query* untuk menganalisis hubungan tema dengan informan, project map untuk memvisualisasikan jaringan hubungan antar tema dan stakeholder, serta *word frequency analysis* untuk mengidentifikasi kata kunci dominan. Keempat, tahap visualisasi data menggunakan cluster analysis diagram untuk mengelompokkan tema berdasarkan kemiripan, *chart visualization* berbentuk grafik batang untuk menampilkan distribusi tema pada setiap informan, dan network diagram untuk memetakan koneksi antar stakeholder dalam transformasi digital. Kelima, tahap interpretasi dan validasi dilakukan melalui coding comparison antar peneliti untuk memastikan reliabilitas, auto-coding untuk konsistensi kategorisasi, dan ekspor hasil analisis dalam bentuk laporan dan visualisasi. (Kaefer et al., 2015). Penggunaan *Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS) seperti *NVivo* memungkinkan analisis data yang lebih sistematis, terstruktur, dan transparan dalam penelitian kualitatif (Paulus et al., 2018).

Uji kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi data dengan membandingkan data dari berbagai sumber, member check dengan melakukan konfirmasi temuan kepada informan, perpanjangan waktu pengamatan untuk memastikan kedalaman data, *peer debriefing* dengan mendiskusikan temuan bersama rekan peneliti, dan audit trail dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bina Baru

Gambar I. Visualisasi

Sumber : Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2025

Hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan dana desa di Desa Bina Baru mengalami kondisi paradoksal dengan pencapaian yang beragam di berbagai aspek implementasi. Kepala Desa menyatakan bahwa *"sistem pengelolaan dana desa sudah berjalan lancar, sesuai dengan juknis dari Kementerian Desa,"* sementara Kepala Urusan Keuangan mengonfirmasi bahwa sistem yang digunakan *"mudah digunakan"* dan *"sudah menggunakan sistem digital dan berjalan optimal."*

Dari aspek implementasi sistem digital, Desa Bina Baru telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan digital yang berjalan secara operasional. Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) telah diimplementasikan dan digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan desa, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dari perspektif operasional internal, digitalisasi telah memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menjalankan fungsi administratif dan manajerial pengelolaan dana desa.

Berdasarkan observasi lapangan, sistem digital yang diterapkan mencakup aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan, aplikasi pelaporan online ke Kementerian Desa, dan sistem pencatatan digital untuk inventarisasi aset desa. Operator Desa menjelaskan bahwa *"dengan sistem digital ini, pekerjaan kami menjadi lebih efisien, tidak perlu lagi mencatat manual dan risiko kehilangan data juga berkurang."*

Namun, digitalisasi menghadapi tantangan signifikan dalam aspek aksesibilitas publik. Kepala Desa menjelaskan bahwa sistem *"hanya akses hanya terbatas pada operator saja, masyarakat tidak dapat mengakses,"* kondisi yang diperkuat oleh pernyataan Operator Desa bahwa *"untuk saat ini masyarakat belum bisa mengakses."* Keterbatasan akses ini menciptakan paradoks dalam digitalisasi, dimana kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Tokoh Masyarakat mengungkapkan keprihatinannya bahwa *"kami sebagai masyarakat ingin tahu bagaimana dana desa digunakan, tetapi tidak ada cara untuk mengakses informasi tersebut secara digital."* Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem digital telah diterapkan secara internal, prinsip *good governance* khususnya transparansi belum tercapai secara optimal.

Stabilitas Teknis dan Infrastruktur

Stabilitas teknis menjadi dimensi ketiga yang menggambarkan kondisi digitalisasi di Desa Bina Baru. Hampir seluruh informan mengidentifikasi masalah teknis sebagai kendala utama dalam operasional sistem digital. Kepala Desa menyebutkan "*aplikasi yang kadang error*," sementara Kepala Urusan Keuangan menegaskan bahwa "*sering terjadi error*." Tokoh Masyarakat bahkan mengidentifikasi "*seringnya error pada server aplikasi*" dan sistem yang "*sering terkendala di server maintenance*".

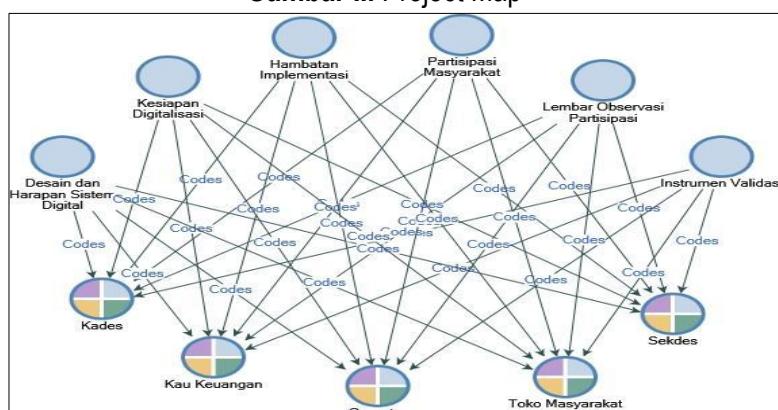
Masalah teknis yang sering terjadi meliputi: *server down* yang menyebabkan sistem tidak dapat diakses, lambatnya respon aplikasi karena keterbatasan *bandwidth internet*, *error* dalam proses sinkronisasi data antara sistem lokal dan pusat, serta kegagalan backup data yang berpotensi menyebabkan kehilangan informasi penting. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Saputro et al., 2021) yang mengidentifikasi tantangan konektivitas dan aksesibilitas sebagai hambatan utama dalam implementasi teknologi digital di daerah terpencil.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa "*ketika sistem error, kami terpaksa kembali ke pencatatan manual sementara, yang tentunya menghambat efisiensi kerja*." Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas infrastruktur teknologi menjadi faktor kritis dalam keberhasilan digitalisasi pengelolaan dana desa. Penelitian (Neumeyer et al., 2021) menekankan pentingnya infrastruktur teknologi yang stabil untuk mendukung adopsi teknologi digital, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi di daerah dengan keterbatasan sumber daya.

Peran Stakeholder dalam Transformasi Digital

Hasil analisis *Project Map NVivo* menunjukkan bahwa transformasi digital pengelolaan dana desa di Desa Bina Baru melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kontribusi yang spesifik.

Gambar II. Project Map



Sumber : Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2025

Gambar di atas menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara tema-tema penelitian (*nodes*) dengan berbagai informan kunci yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Peta tematik menampilkan koneksi antara kategori utama seperti *Desain dan Harapan Sistem Digital*, *Kesiapan Digitalisasi*, *Hambatan Implementasi*, *Partisipasi Masyarakat*, *Lembar Observasi Partisipasi*, serta

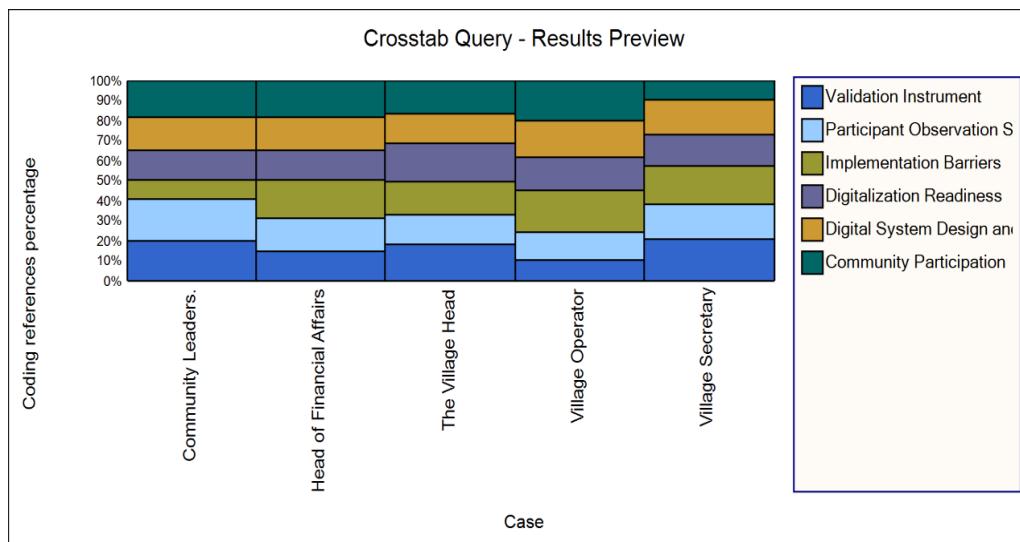
Instrumen Validasi dengan aktor-aktor utama di desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Operator Desa, dan Tokoh Masyarakat.

Analisis menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki keterhubungan dengan hampir seluruh tema, yang menandakan bahwa proses digitalisasi dana desa merupakan sebuah sistem yang bersifat partisipatif, multidimensi, dan memerlukan sinergi antara berbagai pihak. Kepala Desa berperan sebagai visioner dan pengambil keputusan strategis, dengan keterlibatan yang menonjol dalam tema desain dan harapan sistem digital serta instrumen validasi.

Secara keseluruhan, hasil crosstab ini menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan dana desa di Desa Bina Baru tidak bisa dipandang hanya sebagai perubahan teknologi, melainkan sebagai proses sosial yang membutuhkan kolaborasi lintas aktor. Temuan ini memperlihatkan pentingnya desain sistem yang adaptif, kesiapan sumber daya manusia, validasi instrumen yang tepat, serta partisipasi masyarakat yang aktif agar tujuan digitalisasi yakni transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa dapat tercapai secara optimal.

Kepala Desa menjelaskan visinya bahwa *"digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel."* Peran strategis ini tercermin dalam keputusan-keputusan penting terkait pengadaan sistem, alokasi anggaran untuk digitalisasi, dan penetapan kebijakan penggunaan teknologi.

Gambar III. Visualisasi



Sumber : Nvivo 12 Plus analysis results, 2025

Dari grafik terlihat bahwa enam tema utama penelitian, yaitu *Partisipasi Masyarakat, Lembar Observasi Partisipasi, Kesiapan Digitalisasi, Instrumen Validasi, Hambatan Implementasi, serta Desain dan Harapan Sistem Digital* muncul pada seluruh aktor. Hal ini memperlihatkan bahwa semua tema bersifat lintas peran dan tidak hanya melekat pada satu pihak saja. Dengan kata lain, implementasi digitalisasi

pengelolaan dana desa merupakan sebuah ekosistem kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sejalan dengan temuan (Razak et al., 2024) tentang pentingnya integrasi multi-stakeholder dalam pengembangan model tata kelola dana desa.

Kepala Urusan Keuangan dan Operator Desa berperan sebagai implementor teknis dengan dominasi pada tema kesiapan digitalisasi dan hambatan implementasi. Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan sistem digital, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan teknis dan kendala operasional. Penelitian (Ismayadi et al., 2023) menekankan pentingnya efektivitas literasi digital dalam meningkatkan keterampilan aparatur desa, yang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem digital.

Kepala Urusan Keuangan menyatakan bahwa *"kami yang paling merasakan dampak positif dan negatif dari implementasi sistem digital ini. Positifnya adalah pekerjaan menjadi lebih terstruktur, tetapi ketika ada masalah teknis, pekerjaan menjadi terhambat."* Operator Desa menambahkan bahwa *"setiap hari kami berinteraksi dengan sistem, jadi kami yang paling memahami kelebihan dan kekurangan sistem yang ada."*

Sekretaris Desa berperan sebagai koordinator administratif dengan kontribusi yang merata di semua tema penelitian, terutama dalam instrumen validasi dan lembar observasi partisipasi. Sebagai koordinator, Sekretaris Desa memiliki fungsi penting dalam menghubungkan berbagai unit kerja dan memastikan sinkronisasi data antar bagian.

Partisipasi Masyarakat

Peran masyarakat dalam transformasi digital saat ini masih terbatas dan konvensional. Tokoh Masyarakat menunjukkan keterkaitan erat dengan tema partisipasi masyarakat, mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kepedulian dan kesiapan untuk terlibat dalam transformasi digital. Partisipasi masyarakat saat ini terwujud melalui mekanisme konvensional seperti *"Musrenbang yang dimana kita memilih pendapat atau saran yang diberikan masyarakat" dan akses informasi melalui "papan informasi anggaran tahunan."* Tokoh Masyarakat mengungkapkan harapannya bahwa *"ke depannya masyarakat bisa ikut terlibat dalam proses digital, tidak hanya sebagai penerima informasi tetapi juga sebagai pemberi masukan melalui sistem digital."* Meskipun partisipasi masih terbatas, hasil FGD menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi untuk terlibat dalam transformasi digital. Beberapa warga menyatakan kesiapannya untuk belajar menggunakan teknologi digital jika disediakan pelatihan dan akses yang memadai.

Strategi Peningkatan Efektivitas Digitalisasi

Berdasarkan temuan penelitian, keberhasilan digitalisasi pengelolaan dana desa di Desa Bina Baru memerlukan strategi komprehensif yang bersifat holistik dan melibatkan seluruh stakeholder. Analisis mendalam terhadap kondisi existing dan aspirasi stakeholder menghasilkan lima strategi utama yang perlu diimplementasikan secara terintegrasi.

Peningkatan Aksesibilitas dan Transparansi

Strategi peningkatan aksesibilitas menjadi prioritas utama mengingat keterbatasan akses masyarakat merupakan isu sentral. Pengembangan platform digital yang dapat diakses publik harus mencakup pembangunan portal transparansi digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi pengelolaan dana desa secara real-time. Portal transparansi digital yang direkomendasikan meliputi: dashboard keuangan desa yang menampilkan realisasi anggaran per kegiatan, sistem pelaporan kemajuan proyek dengan foto dan dokumentasi, platform pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan, dan fitur survei digital untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap program desa.

Implementasi sistem survei digital sebagaimana disarankan oleh Kepala Urusan Keuangan tentang "sistem yang ada angket digitalnya" akan memungkinkan masyarakat memberikan input dan evaluasi terhadap program desa secara digital. Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi *mobile* yang *user-friendly* untuk memudahkan akses masyarakat.

Stabilisasi Infrastruktur dan Sistem Teknis

Strategi stabilisasi infrastruktur menjadi fundamental untuk mengatasi masalah error aplikasi dan ketidakstabilan server. *Upgrade* infrastruktur *hardware* dengan meningkatkan spesifikasi perangkat komputer dan server sesuai kebutuhan operasional sistem yang lebih kompleks menjadi prioritas. Optimalisasi konektivitas internet untuk memastikan ketersediaan *bandwidth* yang memadai dan stabil, tidak hanya untuk mendukung operasional internal tetapi juga akses masyarakat yang lebih luas. Implementasi sistem *backup* otomatis dan *disaster recovery* untuk mencegah kehilangan data dan memastikan kontinuitas operasional sistem. Pengembangan sistem monitoring dan *alert* untuk deteksi dini masalah teknis sehingga dapat ditangani sebelum mengganggu operasional. Kerjasama dengan *provider* teknologi untuk memastikan dukungan teknis yang responsif dan berkelanjutan.

Pengembangan Kapasitas SDM

Program peningkatan kapasitas yang telah diinisiasi oleh Kepala Desa berupa "Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD" perlu diperluas melalui pelatihan teknis berkelanjutan untuk operator dan perangkat desa. Program pelatihan harus mencakup aspek teknis operasional sistem, manajemen data dan keamanan informasi, serta *customer service* digital. Program literasi digital masyarakat menjadi komponen penting yang harus dikembangkan secara sistematis, dimulai dari tokoh masyarakat dan kader desa sebagai *champion digital*. Pelatihan untuk masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dengan fokus pada penggunaan portal transparansi dan platform partisipasi digital. Pengembangan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing kelompok sasaran. Pembentukan tim support internal yang dapat membantu mengatasi masalah teknis ringan dan memberikan panduan penggunaan sistem kepada pengguna baru.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Implementasi mekanisme konsultasi digital yang memungkinkan masyarakat memberikan input dalam perencanaan dan evaluasi program desa. Pengembangan aplikasi *mobile* sederhana yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses informasi dan memberikan masukan. Pembentukan forum digital masyarakat sebagai wadah diskusi dan konsultasi *online* terkait program-program desa. Integrasi sistem voting digital untuk pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Kolaborasi Multi-Stakeholder

Pengembangan kemitraan dengan institusi pendidikan untuk dukungan teknis dan pengembangan kapasitas. Kerjasama dengan sektor swasta untuk sharing *best practice* dan inovasi teknologi. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk harmonisasi sistem dan dukungan kebijakan. Pembentukan *steering committee* digitalisasi yang melibatkan perwakilan dari semua stakeholder untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi implementasi. Regular *review* dan evaluasi bersama untuk monitoring progress dan perbaikan berkelanjutan.

SIMPULAN

Digitalisasi pengelolaan dana desa di Desa Bina saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam aksesibilitas publik dan stabilitas teknis. Sistem digital telah memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, namun prinsip transparansi dan akuntabilitas publik belum tercapai optimal karena masyarakat tidak dapat mengakses sistem digital.

Transformasi digital melibatkan peran kolaboratif dari berbagai stakeholder dengan diferensiasi yang jelas, dimana Kepala Desa berperan sebagai visioner strategis, perangkat teknis sebagai implementor, dan masyarakat masih terbatas pada partisipasi konvensional. Setiap stakeholder memiliki kontribusi spesifik yang saling melengkapi dalam proses transformasi digital.

Strategi peningkatan efektivitas digitalisasi memerlukan pendekatan komprehensif meliputi peningkatan aksesibilitas melalui portal digital publik, stabilisasi infrastruktur teknis, pengembangan kapasitas SDM berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat dengan mekanisme konsultasi digital, dan kolaborasi multi-stakeholder yang diimplementasikan secara bertahap dan terintegrasi.

Keberhasilan digitalisasi pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan komitmen seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, lokasi penelitian terbatas pada satu desa sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke konteks desa lain dengan karakteristik berbeda. Kedua, jumlah informan yang terbatas pada lima orang kunci belum sepenuhnya menangkap keragaman perspektif seluruh stakeholder di desa. Ketiga, periode observasi yang singkat tidak memungkinkan analisis dampak jangka panjang dari implementasi digitalisasi. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif multi-lokasi dengan periode lebih panjang dan melibatkan sampel informan yang lebih luas serta beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, V. P. (2020). *Analisis akuntabilitas, transparansi dan value for money dalam prinsip good governance untuk alokasi dana desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang*.
- Creswell, J. W. (2014). Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. *Thousand Oaks, CA: SAGE Publications*.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423–5443.

Handayani, B. D., Ismiyati, I., & Astuti, D. P. (2023). Environment Concern Through Digitalization of Village Financial Reporting and Accountability of Village Fund Management: Can it Accelerate the Achievement of Village Sustainable Development Goals (SDGs)? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1248.

Ismayadi, Zulfan, Putra Armidin, R., Herianto, T., Satria Lubis, A., Marpaung, J. L., Gunaika, R., Hayatunnufus, Siringoringo, Y. B., Azhari, & Munzaimah. (2023). The Effectiveness of Digital Literacy in Improving Community Skills in the Tanjung Kasau Plantation Village. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 931–936. <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v8i2.11314>

Jumaiyah, Andayani, W., Rosidi, & Purwanti, L. (2025). Digital Transformation in Village Financial Management: a Bibliometric Analysis of Research Evolution and Contemporary Challenges. *Public and Municipal Finance*, 14(2), 15–28. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(2\).2025.02](https://doi.org/10.21511/pmf.14(2).2025.02)

Kaefer, F., Roper, J., & Sinha, P. (2015). A software-assisted qualitative content analysis of news articles: Example and reflections. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 16(2). <https://doi.org/10.17169/fqs-16.2.2123>

Lukiastuti, F., Iskanto, I., & Djou, L. G. (2022). The Mediation Role of the Village Fund Management System on the Relationship Between HR Advantages, Utilization of IT, and Village Government Performance. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 349–359. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.349-359>

Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>

Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193–201. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.95>

Nasution, I. R., & Budianto, B. (2025). Analisis Sistem Informasi Dana Desa Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Tanjung Hataran Kabupaten Simalungun). *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 523–530. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5903>

Neumeyer, X., Santos, S. C., & Morris, M. H. (2021). Overcoming Barriers to Technology Adoption When Fostering Entrepreneurship Among the Poor: The Role of Technology and Digital Literacy. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 68(6), 1605–1618. <https://doi.org/10.1109/TEM.2020.2989740>

Onitsuka, K., Hidayat, A. R. R. T., & Huang, W. (2018). Challenges for the next level of digital divide in rural Indonesian communities. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84(2), 1–25. <https://doi.org/10.1002/isd2.12021>

Paulus, R., Xiong, C., & Socher, R. (2018). A deep reinforced model for abstractive summarization. *6th International Conference on Learning Representations, ICLR 2018 - Conference Track Proceedings*, 1, 1–12.

Prabowo, A., Khairul Muluk, M. R., & Hayat, A. (2021). Model collaborative governance dalam

pembangunan desa pada masa covid-19: studi di Kabupaten Lampung Selatan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 15–31. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5393>

Razak, M. R. R., Sofyan, B., Sofyan, W., Lubis, S., & Rais, T. R. (2024). Development of integrated village fund governance model with siberas public service application. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 2184–2198. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1969>

Saputro, A. R., Gusnadi, A. M., Zanah, Z., & Simatupang, J. W. (2021). Tantangan Konektivitas dan Aksesibilitas Dalam Pengembangan Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine di Indonesia: Sebuah Tinjauan. *JIE Scientific Journal on Research and Application of Industrial System*.

Sugiyono, S. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.

Werner, M., Wiese, M., & Maas, A. (2021). Embedding process mining into financial statement audits. *International Journal of Accounting Information Systems*, 41, 100514. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accinf.2021.100514>

Zhao, W., Liang, Z., & Li, B. (2022). Realizing a Rural Sustainable Development through a Digital Village Construction: Experiences from China. *Sustainability (Switzerland)*, 14(21). <https://doi.org/10.3390/su142114199>

PROFIL SINGKAT

Muhammad Rais Rahmat Razak, lahir pada tanggal 12 Juli 1968. Tempat kelahiran di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Mesin Universitas Hasanuddin Makassar, melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi serta menyelesaikan S3 pada program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar.